

.....

**THE ROLE OF SUB-DISTRICT GOVERNMENT APPARATUS IN
SOCIALIZING THE LAND AND BUILDING TAX (UN) IN
BETUNG DISTRICT BANYUASIN REGENCY**

**PERANAN APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM
MENSOSIALISASIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN**

Antartila Rezki Aziz

*Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara
Jl. Sukerejo Sukatani Kenten Palembang
AntartilaRezkiAziz@gmail.com*

ABSTRACT

One source of funding for government funding is in the form of Land and Building Tax (PBB). The Land and Building Tax can be utilized for various functions of determining policies related to land and buildings. The United Nations revenue contributes to relatively small tax revenues, but the Land and Building Tax is a very potential source of revenue for the region.

This research was conducted at the Betung Sub-District Office. Researchers collected data by observation, documentation, and interviews with selected informants related to the socialization of Land and Building Tax (PBB) in Betung District, Banyuasin Regency.

The results of this study indicate that (1) The Role of Betung District Government Apparatus in disseminating Land and Building Tax (PBB) in Betung District Banyuasin District shows the results that the efforts made by the Betung District apparatus as a form of responsibility, as officers who assist in achieving the objectives that have been planned by the Regional Government of Banyuasin Regency has not been maximized. (2) There are inhibiting factors in the socialization efforts such as the number of experts in the field survey and the lack of field transportation facilities that are inadequate to reach areas in Betung Subdistrict, so that the realization of the objectives cannot run optimally. .

Keywords: Socialization, Land and Building Tax (PBB), and apparatus.

ABSTRAK

Salah satu sumber dana sumber dana bagi pemerintah ialah berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan PBB memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Betung. Peneliti mengumpulkan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap informan yang terpilih terkait sosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peranan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Betung dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin menunjukkan hasil bahwa usaha yang dilakukan aparaturnya Kecamatan Betung sebagai bentuk tanggung jawabnya, sebagai petugas yang membantu dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin belum maksimal.. (2) Terdapat faktor penghambat dalam upaya sosialisasi seperti jumlah tenaga ahli dalam survey lapangan serta kurangnya sarana transportasi lapangan yang kurang memadai untuk menjangkau wilayah di Kecamatan Betung, sehingga untuk terwujudnya tujuan tidak dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci : Sosialisasi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan aparaturnya.

1. PENDAHULUAN

Salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi-pengelolaan (Darwin, 2009:23).

Soemitro (2004:41) menyatakan bahwa salah satu sumber dana sumber dana bagi pemerintah ialah berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan PBB memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang nyata-nyata memiliki dan/atau menguasai bumi dan/atau bangunan. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bangunan yang ada di atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, pagar, tempat olahraga, dermaga, tanaman dan lain-lain yang memberikan manfaat. Wajib pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu yang memiliki obyek yang nilai jualnya melebihi nilai minimum yang dibebankan dari pengenaan pajak.

Pajak memiliki pengertian iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang di pungut oleh lembaga tertentu yang di tunjuk (Ditjen Pajak) berdasarkan ketentuan umum perpajakan (Atmojo, 2003).

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peranan dan andil yang cukup peting dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib perpajakan. Wajib pajak baik wajib pajak badan maupun orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara.

Pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara yang digunakan untuk

.....

Aparatur pemerintah selaku abdi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, karena kelancaran dan kemajuan roda pemerintahan tidak terlepas dari keikutsertaan aparatur pemerintah. Salah satu peranan aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat seperti kegiatan sosialisasi, dimana sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Aparatur pemerintahan merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi) (Widjaja, 2006:113).

Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan diharapkan akan dapat terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehingga memungkinkan lestarnya suatu kesadaran perpajakan. Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi riil sementara di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini, Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Betung pada saat ini sangat rendah berdasarkan observasi lapangan menunjukkan indikasi adanya peran aparatur pemerintah dalam mensosialisasikan pajak bumi dan bangunan ini terlihat dari :

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap arti dari pada PBB dalam pembiayaan pembangunan.
2. Kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan PBB.
3. Sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar PBB.
4. Kepatuhan wajib pajak yaitu dalam hal menghitung besarnya PBB yang harus dibayar, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, melaporkan serta menyetorkan kewajiban pajak dengan tepat waktu dipandang masih rendah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan daerah, sehingga diperlukan sosialisasi lebih intensif. Peranan instansi terkait sosialisasi PBB hingga pada tingkat kecamatan diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Berkaitan dengan fenomena di atas, maka menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Peranan Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.”**

2. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2002:68).

Menurut Biddle dan Thomas dalam Soekanto (2002:70), peranan adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu yang meliputi :

- a. Program Kerja, merupakan sebuah rencana program/ kegiatan organisasi yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan tujuan yang akan dicapai yang telah disepakati oleh seluruh pengurus organisasi.

-
- b. Sumber Daya, sangat berpengaruh besar terhadap tercapainya tujuan suatu program ataupun kegiatan yang meliputi sumber daya manusia (SDM) dan finansial (pendanaan).
 - c. Pengaruh Kebijakan, yaitu keberhasilan suatu implementasi kebijakan diawali dari konsep bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut dimaksudkan untuk diimplementasikan
 - d. Responsivitas Masyarakat, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat.

Aspek yang akan diperoleh dari penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan pemerintah akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, menurut Dhani (2006:10) antara lain:

a. Waktu

Dalam mensosialisasikan pajak pemerintah dapat menggunakan waktu di setiap kesempatan yang ada, baik dengan mengunjungi ke masing-masing rumah atau tempat usaha, maupun saat wajib pajak sendiri datang ke kantor pajak setempat.

b. Media yang digunakan

Media informasi tentang pajak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang di perhatikan masyarakat, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan yaitu: Televisi, Koran, Spanduk, media *Flyer* (spanduk dan poster), Radio, Media Billboard/mini billboard maupun media internet.

c. Bentuk sosialisasi

Bentuk sosialisasi berupa penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditekankan pada manfaat pajak dan pelayanan pajak di masing-masing unit. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat melalui seminar, diskusi, serta penyuluhan.

d. Tujuan dan manfaat sosialisasi

Program yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan kegiatan penyuluhan bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat. Untuk meningkatkan atau menimbulkan kesadaran akan kewajiban dalam hal pembayaran pajak diperlukan suatu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan sekiranya dapat langsung mengenai sasaran yaitu wajib pajak. Sehingga diharapkan mereka sadar akan kewajibannya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Betung. Peneliti mengumpulkan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Peranan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dalam Mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin serta faktor yang mempengaruhi sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung. Adapun indikator dari Peranan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dalam Mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin akan diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut.

1. Hasil Penelitian

A. Peranan Aparatur Pemerintah Kecamatan Betung

Peranan instansi terkait sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga pada tingkat kecamatan diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Adapun aspek terkait Peranan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dalam Mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, meliputi :

1. Program Kerja

Dengan jumlah 8 Desa yang merupakan tempat tinggal dan tempat berusaha untuk sebagian besar penduduk di Kecamatan Betung maka tidak berlebihan jika Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin memberikan perhatian lebih untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan, maka diperlukan peran aktif dari pihak pemerintah daerah dalam memberikan informasi. Pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, maka masyarakat wajib pajak mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan dengan semua peraturan pelaksanaannya, maka diperlukan peran aktif dari pihak pemerintah daerah sampai dengan tingkat kecamatan dan desa untuk memberikan informasi, pengertian, dan penyuluhan kepada wajib pajak dalam bentuk sosialisasi perpajakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya sangat berpengaruh besar terhadap tercapainya tujuan suatu program ataupun kegiatan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang ada akan memudahkan jalan tercapainya tujuan program ataupun kegiatan. Berdasarkan keahlian dan tanggung jawab yang dimilikinya sumber daya manusia/aparatur yang profesional akan memberikan seluruh pemikiran, tenaga dan keahliannya dalam bidangnya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan yang sedang dijalankan. Begitupun sebaliknya ketika suatu kebijakan dijalankan oleh sumber daya anggota yang tidak profesional, maka hal tersebut akan menjadi hambatan bagi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Sehingga munculnya persepsi negatif dari masyarakat karena pelayanan publik yang diberikan tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, yang berakibat pada kurang mendukungnya aparatur/anggota terhadap program/kegiatan tersebut.

3. Pengaruh Kebijakan

Keberhasilan suatu kegiatan khususnya Peranan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dalam Mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin diawali dari konsep bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut dimaksudkan untuk diimplementasikan.

Konsep ukuran dari arah kebijakan Peranan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dalam mensosialisasikan PBB di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yang tidak tepat dapat berdampak negatif bagi kegiatan tersebut, dimana dalam proses berjalannya kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan, hal tersebut dapat dikarenakan kegiatan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat atau kegiatan tersebut membutuhkan strategi lain dalam penerapannya, sehingga konsep ukuran daripada kebijakan tersebut diterapkan adalah satu diantara proses penting agar kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana.

4. *Resvonsivitas*

Bentuk sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung melalui bantuan dari aparatur Pemerintah Kecamatan Betung dilakukan melalui beberapa program kegiatan kepada masyarakat, dimana aparatur dituntut bukan hanya harus

memiliki pengetahuan yang luas tetapi juga harus memiliki kesadaran emosional agar tercapai kegiatan yang memuaskan dan sepenuh hati sesuai dengan standar kegiatan yang berkualitas.

B. Cara Penyampaian Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Waktu

Secara hukum alam waktu tidak dapat diatur dan diberhentikan sesuai keinginan manusia, karena waktu akan terus berjalan tanpa bisa dihalang-halangi bagaimanapun kuatnya seorang manusia. Fakta inipun berlaku bagi berlangsungnya suatu kebijakan dimana ketika suatu kebijakan dibentuk dan sudah ditentukan kapan dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, maka sumber daya-sumber daya yang ada baik sumber daya aparatur maupun sumber daya finansialnya harus betul-betul menjalankan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing agar terjadi keseimbangan bekerja sehingga tidak menyalahi waktu yang sudah ditentukan.

2. Media

Proses berjalannya suatu pembangunan juga tidak terlepas dari sumber daya finansial atau keuangan yang digunakan, dimana sumber daya finansial/keuangan sangat berpotensi besar sebagai pendukung media dalam menjalankan program sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung sesuai tujuan. Sumber daya manusia yang memadai tidak akan dapat merealisasikan kegiatan tersebut secara optimal manakala tidak didukung secara sumber daya finansial yang mencukupi. Begitupun sebaliknya, ketika sumber daya finansial mencukupi untuk menjalankan suatu kegiatan/program manakala tidak didukung oleh sumber daya manusia yang bertanggung jawab akan menjadi hambatan bagi tercapainya suatu tujuan kegiatan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung.

3. Bentuk sosialisasi

Kerjasama antar aparatur, baik antara camat dan bawahan maupun antara sesama pegawai dalam suatu organisasi sangat diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi, begitu pula dalam hal kegiatan bermasyarakat. Setelah peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai Peranan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dalam mensosialisasikan PBB di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kerjasama antara sesama pegawai terjalin dengan baik. Jika salah satu pegawai tidak dapat hadir di lapangan, maka pegawai yang lain bersedia menggantikan tugasnya, sehingga kegiatan tidak tertunda.

4. Tujuan dan Manfaat Sosialisasi

Faktor dari peranan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung yang harus diperhatikan adalah tujuan dari program kerja tersebut. Suatu tujuan menjadi pedoman dan target bagi aparatur/anggota dalam mencapai tujuan. Karena tujuan yang baik jika tidak diiringi dengan kesungguhan aparatur/anggota juga dukungan masyarakat maka tujuan tersebut hanya akan menjadikan wacana saja dan tidak akan tercapai.

2. Pembahasan

A. Peranan Aparatur Pemerintah Kecamatan Betung

1. Program Kerja

Peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.

Dalam rangka pencapaian program Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung berkelanjutan, perlu disusun rencana/sasaran produksi dan

produktivitas setiap tahun, termasuk gerakan operasional di tingkat lapangan. Aparatur pemerintahan Kecamatan Betung sebagai pelaku utama penggerak sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perlu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran produksi dan produktivitas target pencapaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dalam rangka mendorong kemandirian dan otonomi yang baik di tingkat kecamatan akan terus dilanjutkan melalui berbagai program kegiatan, salah satunya melalui sosialisasi ini sendiri yang diharapkan mampu meningkatkan target pencapaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung.

2. Sumber Daya

Peranan aparatur Kecamatan Betung dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, karena pada dasarnya sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan berhasil dan mencapai tujuannya ketika dijalankan oleh sumber daya aparatur yang memadai.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Widjaja, (2006:113) yang mengemukakan bahwa aparatur pemerintah selaku abdi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, karena kelancaran dan kemajuan roda pemerintahan tidak terlepas dari keikutsertaan aparatur pemerintah. Salah satu peranan aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat seperti kegiatan sosialisasi, dimana sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak.

Usaha yang dilakukan aparatur Kecamatan Betung sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai petugas yang membantu dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin, walau ada hal-hal yang harus dibenahi seperti jumlah tenaga ahli dalam survey lapangan serta kurangnya sarana transportasi lapangan yang kurang memadai untuk menjangkau wilayah di Kecamatan Betung, sehingga untuk terwujudnya tujuan tidak dapat berjalan secara optimal.

Pemerintah Kecamatan Betung khususnya pada tahun 2017 telah mengalokasikan kucuran dana operasional sebesar Rp 25 juta untuk membantu sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung. Dana tersebut di peruntukan untuk operasional ke lapangan serta pembuatan brosur dan spanduk.

3. Pengaruh Kebijakan

Konsep ukuran dari arah kebijakan Peranan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dalam mensosialisasikan PBB di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yang tidak tepat dapat berdampak negatif bagi kegiatan tersebut, dimana dalam proses berjalannya kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan, hal tersebut dapat dikarenakan kegiatan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat atau kegiatan tersebut membutuhkan strategi lain dalam penerapannya, sehingga konsep ukuran daripada kebijakan tersebut diterapkan adalah satu diantara proses penting agar kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana.

Peranan aparatur pemerintahan Kecamatan Betung dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin merancang 3 program, yang mana program ini merupakan inti dari terlaksananya kegiatan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung.

Pada perencanaan program pengembangan UKM ini, aparatur pemerintahan Kecamatan Betung menentukan serta menetapkan kegiatan yang ingin dilakukan seperti dengan menentukan waktu, prosedur, serta kebijakan yang nantinya berguna sebagai acuan

.....

dari perencanaan terhadap ke 3 program ini, agar nantinya program sosialisasi PBB di Kecamatan Betung dapat berjalan dengan baik.

4. *Responsivitas*

Suatu aparatur pegawai harus dapat memberikan kegiatan publik yang efektif melalui bantuan dari aparatur Pemerintah Kecamatan Betung dilakukan melalui beberapa kegiatan yang menyetuh lapisan masyarakat menjadikan daerah ini sebagai target penerimaan hasil PBB yang maksimal. Sependapat dengan Widjaja (2006:113) yang menyatakan bahwa aparatur pemerintahan merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).

B. Cara Penyampaian Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Waktu

Manajemen perencanaan kegiatan dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah Kecamatan Betung antara lain menginformasikan tujuan program binaan, syarat-syarat, tingkat bantuan, mekanisme dan lainnya, menjelaskan syarat yang harus dilakukan oleh wajib pajak, menjelaskan sanksi serta implikasi apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kebijakan, dan menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas aktivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Betung, yang dilaksanakan dalam 1 tahun 2 kali pelaksanaan sosialisasi yang dimulai dari bulan Februari dan bulan Oktober setiap tahunnya.

Uraian hasil penelitian di atas berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Dhani (2006:10) bahwa aspek yang akan diperoleh dari penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan pemerintah akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dimana dalam mensosialisasikan pajak pemerintah dapat menggunakan waktu di setiap kesempatan yang ada, baik dengan mengunjungi ke masing-masing rumah atau tempat usaha, maupun saat wajib pajak sendiri datang ke kantor pajak setempat.

2. Media

Menurut Soekanto (2002) Media informasi tentang pajak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang di perhatikan masyarakat, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan yaitu: Televisi, Koran, Spanduk, media *Flyer* (spanduk dan poster), Radio, Media Billboard/mini billboard maupun media internet.

Pemerintah Kecamatan Betung khususnya pada tahun 2017 telah mengalokasikan kucuran dana operasional sebesar Rp 25 juta untuk membantu sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung. Dana tersebut di peruntukan untuk operasional ke lapangan serta pembuatan brosur dan spanduk sebagai media dalam penyampaian sosialisasi. ketika sumber daya finansial mencukupi untuk menjalankan suatu kegiatan/program manakala tidak didukung oleh sumber daya manusia yang bertanggung jawab akan menjadi hambatan bagi tercapainya suatu tujuan kegiatan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung.

3. Bentuk sosialisasi

Terdapat tiga komponen strategi komunikasi dan sosialisasi yang diterapkan dalam pembinaan. Keterkaitan antara satu komponen dengan yang lainnya sangat erat, dan pada tahap yang berbeda-beda dapat berupa satu kegiatan yang sama. Ketiga komponen tersebut adalah:

- a) Sosialisasi, kegiatan ini bertujuan untuk penyampaian informasi sehingga: (i) terjadi pemahaman yang sama dan mendalam dalam pelaksanaan program; (ii)

.....

untuk membangun kesadaran dan kepedulian bersama; (iii) sosialisasi juga merupakan sarana untuk mendapatkan masukan melalui format-format kegiatan yang bersifat konsultatif.

- b) Edukasi, kegiatan ini bertujuan untuk merubah pola pikir (*mind set*) dan perilaku (*behavior*) dari penerima informasi yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lebih panjang.
- c) Advokasi, kegiatan ini bertujuan untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan.

Penyesuaian diri dalam sosialisasi terjadi secara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan pertambahan ilmu pengetahuan dan penerimaan individu terhadap nilai-nilai dan norma yang ada didalam lingkungan masyarakat dimana masyarakat berada. (Dhani 2006:7).

4. Tujuan dan Manfaat Sosialisasi

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peranan dan andil yang cukup penting dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib perpajakan. Wajib pajak baik wajib pajak badan maupun orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara.

Pajak memiliki pengertian iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dipungut oleh lembaga tertentu yang ditunjuk (Ditjen Pajak) berdasarkan ketentuan umum perpajakan (Atmojo, 2003).

Sesudah mengetahui arti sosialisasi dan pajak diatas, maka dapat diuraikan pengertian sosialisasi perpajakan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak diharapkan akan dapat terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehingga memungkinkan lestarnya suatu kesadaran perpajakan.

Suatu tujuan menjadi pedoman dan target bagi aparatur/anggota dalam mencapai tujuan. Karena tujuan yang baik jika tidak diiringi dengan kesungguhan aparatur/anggota juga dukungan masyarakat maka tujuan tersebut hanya akan menjadikan wacana saja dan tidak akan tercapai. Tujuan sosialisasi PBB di Kecamatan Betung adalah membantu pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin khususnya dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung dari sampai dengan pendataan serta nantinya akan di monitor oleh kami sejauh mana pendataan wajib pajak tersebut serta bisa dapat membantu masyarakat dalam memahami prosedur pembayaran wajib pajak.

5. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian Peranan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Betung dalam Mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

-
1. Peranan Aparatur Kecamatan Betung dalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi dengan adanya bentuk sosialisasi PBB yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kecamatan Betung adalah dengan pemberian brosur imbauan mengenai PBB, dan pemasangan spanduk, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di wilayah Kecamatan Betung yang terarah, tepat sasaran, memiliki tujuan yang jelas serta dapat dimanfaatkan dan didaya gunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
 2. Terdapat faktor penghambat dalam Cara Penyampaian Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti waktu yang kurang pas dalam penyampaian sosialisasi, media informasi yang masih kurang, bentuk sosialisasi masih minim variasi, kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya tujuan dan manfaat sosialisasi serta kurangnya jumlah tenaga ahli dalam survey lapangan, sehingga untuk terwujudnya tujuan tidak dapat berjalan secara optimal.

SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian yang dilakukan penulis. Maka, saran dalam penelitian ini adalah Hendaknya dilakukan sosialisasi menggunakan media sosial yang lebih mudah diakses oleh segenap lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saiffudin, 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan Ke-enam, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Darwin. MBP. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Komaruddin. 2004. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF
- Kurniawan, Dhani. 2006. *Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Marsono. 2006. *Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta : PT. Djambatan.
- Muhammad, Rusjdi. 2004. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : PT Indeks.
- Pramono, Dwi Atmojo. 2003. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan periode 1998-2002*. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Rochmat, Soemitro. 2004. *Pajak Bumi dan Bangunan* (edisi revisi). Bandung : PT Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya.
- Siagian, Sondang. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 1. Cetakan ke 8. Jakarta : Bumi Aksara
- Simamora. 2005. *Manajemen Personal*. Yogyakarta : Liberty.
- Soekanto. 2002. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT Indeks, Kelompok Gramedia.
- Soewarno, Handyaningrat. 2001. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : CV Andi.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta : CV. Alfabeta.
- Terry, George. R. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.